



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan: 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); 4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	34 (Tiga Puluh Empat)
Hari/Tanggal	:	Senin, 11 September 2017
W a k t u	:	Pukul 14.45 s.d 15.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN), didampingi oleh: 1. Bowo Sidik Pangarso (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG); 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra); 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD); 4. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-program yang Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hadir	:	35 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala BKPM, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang dibuka pada pukul 14.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja dan RDP pada hari Senin, 11 September 2017 dalam rangka membahas Persetujuan RKA K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-program yang Didanai oleh DAK.

3. Ketua Rapat menyampaikan hasil konsinyering tanggal 7 September 2017 dalam rangka pembahasan RKA K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Tahun 2018 dan dan Usulan Program-program yang Didanai oleh DAK.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Kepala BKPM, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang untuk memberikan tanggapan/penjelasan mengenai RKA K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Tahun 2018 dan Usulan Program-program yang Didanai oleh DAK.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas penjelasan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala BKPM, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang.

II. KESIMPULAN

A. Kementerian Koperasi dan UKM

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 sebesar **Rp944.538.384.000,00** (*Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*), termasuk anggaran Dewan Koperasi Indonesia sebesar **Rp14.325.000.000,00** (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima usulan **realokasi** anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 untuk program prioritas utama **Pengembangan Kewirausahaan** sebesar **Rp17.230.874.000,00** (*Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*), dengan rincian Rp9.890.000.000,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) untuk pelatihan wirausaha muda/pemula dan sebesar Rp7.340.874.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*) untuk bantuan permodalan wirausaha muda/pemula, sehingga pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 setelah perubahan untuk 5 (lima) program, menjadi sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 209.084.738.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 81.265.500.000,00
3	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Rp 528.228.147.000,00
4	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp 42.916.289.000,00
5	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Rp 83.043.710.000,00
	Jumlah	Rp 944.538.384.000,00

3. Komisi VI DPR RI memahami usulan tambahan anggaran DEKOPIN Tahun 2018 sebesar Rp35,675,000,000,00 (*Tiga Puluh Lima miliar Enam ratus Tujuh puluh lima juta Rupiah*) di luar total anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp944.538.384.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

4. Komisi VI DPR RI tidak bisa menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 Kementerian Koperasi dan UKM sebesar **Rp100.000.000.000,00** (*Seratus Miliar Rupiah*) karena alur pengusulan DAK Tahun 2018 tidak diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tetapi ditetapkan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

B. BKPM

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017, sebesar **Rp548.229.840.000,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima usul tambahan anggaran sebesar Rp187.000.500.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah*), sehingga total anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2018 menjadi **Rp735.230.340.000,00** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Selanjutnya, keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

C. KPPU

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 sebesar **Rp134.795.052.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima usul tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp41.500.000.000,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), sehingga total anggaran tahun 2018 menjadi **Rp176.295.052.000,00** (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Selanjutnya, keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua KPPU akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

D. BP BATAM

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017, sebesar **Rp2.046.159.533.000,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima usulan tambahan anggaran BP Batam Tahun 2018 sebesar **Rp108.000.000.000,00** (*Seratus Delapan Miliar Rupiah*) untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan dan rumah sakit sehingga total anggaran

BP Batam menjadi **Rp2.154.159.533.000,00** (*Dua Triliun Seratus Lima Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Selanjutnya, keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

E. BPKS SABANG

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017, sebesar **Rp224.864.020.000,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima usulan tambahan anggaran BPKS Sabang sebesar **Rp100.135.980.000,00** (*Seratus Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) untuk 5 (lima) kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan lahan Kawasan Tourism Port Teluk Sabang sehingga total anggaran BPKS Sabang tahun 2018 menjadi **Rp325.000.000.000,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).

Selanjutnya, keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Sabang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB.